



The Development of American and Japanese Colonialism in the Philippine Islands (1899-1946) Reviewed Using A Diachronic Approach

Ardi Tri Yuwono¹, Vengadacruz Vicaldo²

*Corresponding author email: arditriyuwono1945@gmail.com

¹Universitas Nusantara PGRI Kediri

²Adventist University of the Philippines

Abstract: Colonialism refers to the practice of a country's domination of territory and population outside its territorial boundaries. This phenomenon has resulted in significant changes in many countries around the world, including the Philippine Islands. Since the arrival of colonial powers, such as the United States and Japan, the Philippine Islands have undergone changes in social, political, and economic aspects. This research aims to explore the impact of the colonial power on social, political, and economic development in the Philippine Islands. The method used in this study is a historical method with a qualitative approach. In addition, a diachronic approach is applied to understand the history of colonialism in the Philippine Islands chronologically. The results of this study show that there are differences in the practice of colonialism between the United States and Japan in the Philippine Islands. The United States carried out colonialism in the Philippine Islands by guiding the Philippines towards a better democratic system through education. Meanwhile, the Japanese occupation of the Philippines carried out colonialism by forcing Filipinos to work forcibly in the agricultural sector.

Keywords: Philippine historiography, colonialism, United States, Japan.

Perkembangan Kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Kepulauan Filipina (1899-1946) Ditinjau Dari Pendekatan Diakronik

Abstrak: Kolonialisme merujuk pada praktik dominasi suatu negara terhadap wilayah dan penduduk di luar batas teritorialnya. Fenomena ini telah mengakibatkan perubahan signifikan di banyak negara di dunia, termasuk Kepulauan Filipina. Sejak kedatangan kekuatan kolonial, seperti Amerika Serikat dan Jepang, Kepulauan Filipina mengalami perubahan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari kekuatan kolonial tersebut terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Kepulauan Filipina. Penelitian ini mengaplikasikan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, pendekatan diakronik diterapkan untuk memahami sejarah kolonialisme di Kepulauan Filipina secara kronologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan praktik kolonialisme antara Amerika Serikat dan Jepang di Kepulauan Filipina. Amerika Serikat melakukan praktik kolonialisme di Kepulauan Filipina dengan cara membimbing Filipina menuju sistem demokrasi yang lebih baik melalui pendidikan. Sementara itu, pendudukan Jepang di Filipina melakukan praktik kolonialisme dengan cara memaksa penduduk Filipina untuk bekerja secara paksa di sektor pertanian.

Kata Kunci: Historiografi Filipina, Kolonialisme, Amerika Serikat, Jepang.

PENDAHULUAN

Kolonialisme dapat dipahami sebagai suatu konsep yang melibatkan pendelegasian kekuasaan politik untuk menguasai dan memberdayakan wilayah lain, serta semua kebijakan dan hak diatur oleh negara yang menduduki wilayah tersebut (Mulya, 2012). Dalam konteks ini, negara yang mengirimkan kekuatan politik berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan wilayah yang dikuasai berstatus sebagai negara bawahan (Miftakhuddin, 2019). Sebagai sebuah ide, kolonialisme mencerminkan pergerakan manusia sebagai respons terhadap kondisi alam yang tidak lagi mendukung (Mulya, 2012). Selain itu, kolonialisme juga dapat diartikan sebagai sistem suatu negara yang menguasai penduduk dan sumber daya negara lain, serta tetap mempertahankan hubungan dengan negara asalnya (Driks, 1992).

Kolonialisme dapat didefinisikan sebagai tindakan eksploitasi terhadap seseorang dan sumber daya oleh bangsa asing (Osterhammel, 1997). Para penjajah sering kali menguasai kekuasaan politik dan memandang masyarakat yang mereka kuasai sebagai inferior dibandingkan dengan mereka dalam aspek hukum, administrasi, sosial, budaya, maupun biologis (Nkrumah, 2023). Fenomena kolonialisme telah memberikan dampak signifikan terhadap banyak negara di seluruh dunia, termasuk Filipina. Sejak kedatangan kekuatan kolonial dari Amerika Serikat dan Jepang, Filipina mengalami perubahan yang mendalam dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi (Skrabania, 2021).

Kepulauan Filipina yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau, memiliki warisan sejarah yang sangat kaya dan beragam. Penelitian sejarah mengenai Filipina menjadi krusial untuk memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang telah berlangsung di wilayah ini, terutama dalam konteks periode kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di kepulauan tersebut (Lacsamana, 1990). Pendekatan diakronik yang menekankan analisis perkembangan sejarah dalam kerangka waktu, memberikan landasan yang komprehensif untuk mengeksplorasi perubahan serta kontinuitas dalam sejarah Filipina. Penjajahan Amerika Serikat yang dimulai pada abad ke-20 merupakan titik balik yang signifikan dalam sejarah Filipina, yang membawa dampak besar terhadap struktur sosial, pendidikan, dan pemerintahan (Agoncillo, 1990). Upaya untuk meraih kemerdekaan dan berbagai bentuk penjajahan menjadi komponen penting dalam pembentukan identitas nasional Filipina, yang terus mengalami perkembangan pada masa kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Kepulauan Filipina (Russell & Rodriguez, 1923).

Penelitian mengenai perkembangan kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Filipina dengan pendekatan diakronik sangat penting dan diperlukan, terutama dalam konteks historiografi Filipina berbahasa Indonesia yang masih terbatas. Meskipun terdapat banyak kajian yang membahas kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Filipina, masih banyak aspek yang belum dieksplorasi secara mendalam, khususnya dalam pendekatan diakronik. Penelitian ini dapat mengisi kekurangan tersebut dan memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman mengenai sejarah Filipina pada masa kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di kepulauan tersebut. Selain itu, kajian tentang kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Filipina memiliki relevansi yang luas, tidak hanya bagi masyarakat Filipina, tetapi juga bagi studi sejarah kolonialisme secara global.

Penelitian sebelumnya mengenai sejarah kolonialisme di Filipina telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain: (1) Kajian tentang masa pendudukan Jepang di Filipina (1941-1945) oleh Khari Purnawanto (2007); (2) Analisis mengenai pembentukan masyarakat kolonial di Kepulauan Filipina hingga akhir abad ke-19 oleh Dias Pradadimara (2013), serta; (3) Penelitian tentang imperialisme Amerika Serikat di Filipina Selatan pada tahun 1898-1941 oleh Mei Entantri (2016). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai periode penjajahan di Filipina, terutama dalam konteks pendekatan diakronik. Pentingnya mendalami sejarah penjajahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang di Filipina memiliki relevansi yang signifikan, terutama jika menerapkan pendekatan diakronik (yang melihat perkembangan sejarah secara kronologis), yakni: (1) Kedua periode penjajahan tersebut meninggalkan warisan kolonial yang saling berhubungan. Struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dibangun oleh Amerika Serikat di Filipina menjadi landasan bagi Jepang untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, dan; (2) Memahami hubungan antara kedua periode penjajahan tersebut memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang lebih kompleks dan mendalam.

Penelitian yang menggunakan pendekatan diakronik terhadap kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Filipina, berpotensi memberikan sejumlah kontribusi baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yakni memperluas pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antar periode kolonialisme Amerika Serikat dan kolonialisme Jepang di Filipina serta dampaknya terhadap kondisi yang muncul di periode berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan pemikiran sejarah diakronik yang masih

jarang diterapkan oleh para peneliti dalam kajian sejarah Filipina, khususnya pada masa kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di kepulauan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Filipina melalui pendekatan diakronik, sehingga kita dapat memahami perubahan dan dinamika yang terjadi pada masa kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Filipina. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul penelitian Perkembangan Kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Kepulauan Filipina (Tahun 1899-1946) Ditinjau Dari Pendekatan Diakronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif serta naratif (Creswell, 2012). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif sangat bermanfaat dalam memahami dinamika perkembangan sejarah (Gorman, 1992). Metode sejarah merupakan suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peristiwa atau fenomena yang terjadi di masa lalu (Kuntowijoyo, 2018). Kartodirdjo (1992) mengidentifikasi empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik sumber; (3) interpretasi; dan (4) historiografi. Salah satu pemikiran sejarah dalam metode sejarah adalah pendekatan diakronik. Pendekatan ini merupakan suatu cara analisis yang menekankan pada perubahan dan perkembangan fenomena, konsep, atau entitas seiring berjalannya waktu (Sukesti, 2015).

Dengan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif disertai ruang lingkup diakronik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dan perkembangan sejarah kolonialisme Amerika Serikat dan Jepang di Kepulauan Filipina dalam periode tertentu. Peneliti akan memulai dengan pengumpulan data historis dari berbagai sumber, termasuk arsip dan literatur yang berkaitan dengan periode kolonial, dimulai dari kedatangan Amerika Serikat pasca Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, diikuti oleh pendudukan Jepang selama Perang Dunia II (1941-1945) di Kepulauan Filipina. Setiap periode akan dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing kekuatan kolonial, yaitu Amerika Serikat dan Jepang, yang mencakup aspek pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta dampaknya

terhadap masyarakat Filipina. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan kedua kekuatan tersebut dalam hal pendekatan kolonialisme dan reaksi masyarakat Filipina terhadapnya. Dengan menggunakan pendekatan diakronik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana warisan kolonial tersebut membentuk identitas masyarakat Filipina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Pendudukan Amerika Serikat di Filipina (1899-1941)

Pada kawasan Benua Amerika, terjadi konflik yang dikenal sebagai Perang Spanyol-Amerika Serikat yang berlangsung dari tanggal 21 April 1898 hingga 10 Desember 1898. Perang ini dipicu oleh ledakan misterius yang mengakibatkan tenggelamnya Kapal Maine Angkatan Laut Amerika Serikat di Pelabuhan Havana, Kuba pada tanggal 15 Februari 1898. Terdapat dugaan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh tindakan pemerintah kolonial Spanyol di Kuba, yang merasa terancam oleh dukungan Amerika Serikat terhadap gerakan kemerdekaan Kuba (Shulimson *et al.*, 1998). Akibat dari perang ini, Spanyol mengalami kekalahan dan menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 10 Desember 1898.

Meskipun Republik Filipina telah didirikan akibat Revolusi Filipina (1896-1898) yang melawan penjajahan Spanyol di Filipina, pemerintah Republik Filipina yang dipimpin oleh Emilio Aguinaldo mengutus Felipe Agoncillo ke Paris untuk merumuskan ketentuan Perjanjian Paris yang bertujuan mengakhiri Perang Spanyol-Amerika Serikat. Felipe Agoncillo, sebagai perwakilan Filipina, tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan mengenai Perjanjian Paris karena pemerintah Republik Filipina saat itu tidak diakui secara *de jure* oleh negara-negara lain. Isi dari Perjanjian Paris yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1898, mencakup: (1) Kemerdekaan Kuba diakui oleh Spanyol dan Amerika Serikat, serta; (2) Penyerahan wilayah Guam, Puerto Riko, dan Filipina kepada Amerika Serikat dengan kompensasi sebesar US\$20.000.000,00. Penyerahan wilayah Guam, Puerto Riko, dan Filipina kepada Amerika Serikat dimaksudkan untuk memperadabkan bangsa tersebut agar dapat mengelola negara republik dengan baik. Perjanjian ini memicu penolakan Republik Filipina terhadap pendudukan Amerika Serikat, yang berujung pada Perang Filipina-Amerika Serikat (1899–1992) (Lacsamana, 1990). Pendudukan Amerika Serikat di Filipina dibagi menjadi tiga periodisasi sebagai berikut:

Perang Amerika Serikat-Filipina (1899-1901)

Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Filipina meletus pada tanggal 4 Februari 1899, ketika dua tentara Amerika Serikat membunuh tiga tentara Filipina dalam serangan besar-besaran yang dilancarkan di Kota San Juan. Hal ini mengakibatkan jatuhnya Ibu Kota Republik Filipina ke tangan tentara Amerika Serikat, yaitu Ibu Kota Manila. Ibu Kota Republik Filipina kemudian dipindahkan ke Malolos, Provinsi Bulacan. Sekitar 126.000 tentara Amerika Serikat terlibat dalam konflik ini, yang mengakibatkan kematian 4.234 tentara Amerika Serikat, serta kematian 12.000 hingga 20.000 tentara Filipina (Deady, 2005). Perang ini juga memicu epidemi kolera yang merenggut nyawa antara 150.000 hingga 200.000 jiwa di Filipina (Silbey, 2007).

Tentara Filipina yang dilengkapi dengan peralatan yang kurang memadai, dengan mudah dikalahkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran terbuka. Namun, dalam konteks perang gerilya, tentara Filipina menunjukkan ketangguhan yang signifikan (Brown, Amadore, & Torrente, 1991). Pada tanggal 31 Maret 1899, Malolos, yang merupakan Ibu Kota Republik Filipina Sementara, berhasil direbut oleh tentara Amerika Serikat. Meskipun demikian, Emilio Aguinaldo beserta pemerintahannya berhasil melarikan diri dan mendirikan Ibu Kota Republik Filipina Sementara di San Isidro, Provinsi Nueva Ecija. Pada tanggal 5 Juni 1899, Antonio Luna, yang merupakan komandan militer paling terampil di bawah kepemimpinan Emilio Aguinaldo, dibunuh oleh pengawal pribadi Emilio Aguinaldo atas permintaan dari Emilio Aguinaldo. Hal ini disebabkan Antonio Luna dianggap memiliki potensi untuk menggulingkan kekuasaan Emilio Aguinaldo (Zaide, 1994).

Kematian Antonio Luna memungkinkan pasukan Amerika Serikat untuk menguasai Pulau Luzon. Pada tanggal 13 November 1899, Emilio Aguinaldo menginstruksikan pembentukan komando gerilya yang terdesentralisasi di berbagai zona militer (Linn, 2000). Jenderal penting lainnya, Gregorio del Pilar, tewas dalam Pertempuran Tirad Pass pada tanggal 2 Desember 1899. Pertempuran Tirad Pass merupakan pertempuran antara Filipina dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk memberikan waktu bagi Emilio Aguinaldo untuk melarikan diri ke Gunung Palali. Pada tanggal 23 Maret 1901, Emilio Aguinaldo ditangkap di Palanan, Provinsi Isabela dan dibawa ke Manila. Amerika Serikat meyakini bahwa perlawanan masih akan berlanjut. Oleh karena itu, pihak Amerika Serikat meminta Emilio Aguinaldo untuk bersumpah setia kepada Amerika Serikat dan mengeluarkan amanat yang menyerukan kepada

rekan seperjuangannya untuk menyerahkan senjata kepada pihak Amerika Serikat, yang secara resmi menandai akhir perang Amerika Serikat-Filipina (Agoncillo, 1990).

Wilayah Kepulauan Filipina dengan Status sebagai Koloni Amerika Serikat (1902-1935)

Pada tanggal 4 Juli 1902, pemerintah Republik Filipina dibubarkan dan kekuasaan eksekutif sepenuhnya dialihkan ke Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, yaitu Adna Chaffee, kepada William Howard Taft sebagai Gubernur Jenderal Amerika Serikat Pertama di Filipina (Ellis, 1918). Dalam periode ini, Amerika Serikat memperkenalkan konsep demokrasi yang terinspirasi dari model barat dan membentuk badan legislatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip ideologi Amerika Serikat (Roberts, 2008). Pada tahun 1903, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang bertugas di Filipina mengesahkan dua undang-undang utama mengenai kepemilikan tanah di Filipina yang bertujuan untuk mengubah petani Filipina tanpa lahan pertanian menjadi pemilik lahan pertanian (Ventura, 2016).

Pada tahun 1905, undang-undang mengenai kepemilikan tanah tidak berhasil. William Howard Taft meyakini bahwa kepemilikan tanah akan mengubah sikap petani Filipina yang tidak mendukung kebijakan Amerika Serikat di Filipina menjadi petani Filipina yang setia kepada pemerintah Amerika Serikat. Struktur sosial di pedesaan Filipina sangat tradisional dan tidak seimbang. Perubahan signifikan dalam kepemilikan tanah menghadapi tantangan besar dari elite lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat di Filipina menganggap bahwa perlawanan dari elite lokal terhadap kepemilikan tanah menjadi penyebab kegagalan undang-undang tersebut. Padahal, undang-undang mengenai kepemilikan tanah dianggap sebagai solusi terbaik untuk pembangunan wilayah Filipina (Ventura, 2016).

Perempuan di Filipina memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan periode ini, terutama terkait dengan isu kesehatan. Banyak perempuan di Filipina yang berprofesi sebagai bidan dan perawat, sehingga membentuk organisasi seperti *La Protección de la Infancia* dan *National Federation of Women's Clubs* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Filipina mengenai kesehatan (Roces, 2016). Selama Perang Dunia I, perempuan Filipina juga berperan dalam memberikan dukungan kesehatan kepada Amerika Serikat dan negara-negara Sekutu dengan mengirimkan suster serta perawat dari Filipina untuk merawat tentara Sekutu yang

terluka. Upaya ini bertujuan untuk meyakinkan Amerika Serikat agar memberikan kemerdekaan Filipina secara *de jure* (Shulimson *et al.*, 1998).

Dalam konteks sosial dan ekonomi, Filipina mengalami perkembangan yang signifikan selama masa kolonial tersebut. Nilai perdagangan internasional meningkat menjadi 601 juta Peso. Pada tahun 1920, sistem kesehatan yang terintegrasi diperkuat dengan pembangunan sejumlah rumah sakit di berbagai pulau terpencil di Filipina. Praktik ilegal di Filipina, seperti perbudakan, pencurian logam besi, dan pemburuan kepala manusia berhasil dihilangkan sepenuhnya. Selain itu, pada tahun 1902, sebuah sistem pendidikan baru diperkenalkan dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, yang kemudian menjadi *lingua franca* di seluruh Kepulauan Filipina. Layanan sipil di Filipina dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1902 dan secara bertahap sepenuhnya dikelola oleh warga Filipina pada tahun 1918 (Reyes, 1923).

Pada tahun 1913, ketika Woodrow Wilson menjabat sebagai Gubernur Jenderal Amerika Serikat di Filipina, sebuah kebijakan baru diperkenalkan dengan tujuan untuk mengarahkan kemerdekaan Filipina secara *de jure* melalui beberapa tahapan. Undang-Undang Jones yang disahkan pada tahun 1916 mencakup komitmen untuk memberikan kemerdekaan *de jure* kepada Filipina dari Amerika Serikat, dengan syarat bahwa Filipina dapat berfungsi sebagai negara Commonwealth Amerika Serikat yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Jika syarat tersebut terpenuhi, Amerika Serikat akan memenuhi janji kemerdekaan tersebut (Morton, 1993).

Wilayah Kepulauan Filipina dengan Status sebagai Commonwealth Filipina (1935-1941)

Pada tahun 1933, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Hare Hawes Cutting yang dianggap sebagai Undang-Undang Kemerdekaan Filipina melalui penggunaan hak veto presiden Amerika Serikat Herbert Hoover (Agoncillo, 1990). Meskipun rancangan undang-undang tersebut disusun dengan bantuan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina yang dipimpin oleh Manuel Luis Quezon, Manuel Luis Quezon menolak rancangan Undang-Undang Hare Hawes Cutting. Penolakan ini disebabkan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Hare Hawes Cutting yang memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk mengendalikan pangkalan angkatan laut di Filipina. Pada tahun 1934, undang-undang revisi terkait pemberian

kemerdekaan Filipina dari Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Undang-Undang Tydings-McDuffie disahkan. Undang-undang ini mengatur pembentukan Commonwealth Filipina yang akan menjalani transisi menuju kemerdekaan penuh (*secara de jure*) setelah sepuluh tahun pemerintahan Commonwealth Filipina. Commonwealth Filipina akan memiliki konstitusi sendiri dan berhak untuk memerintah, meskipun kebijakan luar negeri tetap menjadi tanggung jawab Amerika Serikat serta semua undang-undang di Filipina harus mendapatkan persetujuan dari presiden Amerika Serikat (Brown, Amadore, & Torrente, 1991). Undang-undang ini juga menetapkan bahwa kemerdekaan Filipina akan dirayakan pada tanggal 4 Juli sepuluh tahun kemudian, setelah pemerintahan Commonwealth Filipina dijalankan (Agoncillo, 1990).

Konvensi Konstitusi Commonwealth Filipina berlangsung di Manila pada tanggal 30 Juli 1934 hingga 8 Februari 1935. Pada tanggal 8 Februari 1935, Konstitusi Republik Filipina Tahun 1935 disetujui oleh Konvensi Konstitusi Commonwealth Filipina dan menandai awal pembentukan Commonwealth Filipina. Pemilihan Presiden Commonwealth Filipina dilaksanakan pada tanggal 17 September 1935. Dalam pemilihan presiden tersebut, terdapat beberapa kandidat, yakni Emilio Aguinaldo (mantan Presiden Republik Filipina Tahun 1998-1901), Gregorio Aglipay, dan Manuel Luis Quezon. Dalam pemilihan tersebut, Manuel Luis Quezon berhasil meraih kemenangan dan dilantik sebagai Presiden Commonwealth Filipina pada tanggal 15 November 1935 (Zaide, 1994).

Pemerintah Commonwealth Filipina mulai menyadari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh Jepang, setelah Jepang berhasil menguasai Manchuria pada tahun 1932. Kekhawatiran akan kemungkinan penjajahan Jepang di Filipina semakin meningkat, mengingat kedekatan geografis antara kedua wilayah tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah Commonwealth Filipina mengambil langkah-langkah preventif dengan memberikan pelatihan mengenai taktik gerilya dan penanganan medis dasar kepada penduduk Filipina, sebagai persiapan menghadapi kemungkinan invasi Jepang ke Filipina (Agoncillo, 1990). Pada tahun 1941, kekhawatiran tersebut terbukti ketika Jepang mulai melancarkan invasi ke Filipina dan dimulainya periode baru dalam sejarah Filipina yang ditandai oleh pendudukan Jepang di Filipina (1941-1945).

Pendudukan Jepang di Filipina (1941-1945)

Pada pagi hari tanggal 8 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap Pangkalan Udara Clark yang terletak di Pampanga, Pulau Luzon, Filipina, setelah sepuluh jam dari serangan di Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat. Serangan udara tersebut diikuti dengan pendaratan pasukan darat Jepang di Pulau Luzon. Pasukan Filipina dan Amerika Serikat yang bertahan di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur menghadapi tekanan dari jumlah pasukan Jepang yang lebih besar, sehingga mereka terpaksa mundur ke Semenanjung Bataan dan Pulau Corregidor yang terletak di pintu masuk Teluk Manila. Pada tanggal 2 Januari 1942, Jenderal MacArthur mengumumkan bahwa Ibu Kota Filipina, Manila, akan dijadikan sebagai *open city* untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat perang (Agoncillo, 1990). Istilah *open city* merujuk pada kebijakan militer yang menyatakan bahwa suatu wilayah telah menghentikan semua upaya pertahanan, atau dengan kata lain wilayah tersebut menyerah untuk menghindari kerusakan akibat perang (Kluckhohn *et al.*, 1941).

Pertahanan pasukan Filipina-Amerika Serikat berlangsung hingga di Semenanjung Bataan pada bulan April 1942 dan di Pulau Corregidor pada bulan Mei 1942. Dari total 80.000 tawanan perang Filipina dan Amerika Serikat yang ditangkap oleh Jepang di Bataan, banyak yang dipaksa untuk menjalani *Bataan Death March*. *Bataan Death March* merupakan sebuah tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap tawanan perang Filipina dan Amerika Serikat, dengan cara mereka dipaksa berjalan sejauh 105 kilometer menuju kamp penjara di San Fernando tanpa mendapatkan makanan dan minuman. Sekitar 10.000 tentara Filipina dan 1.200 tentara Amerika Serikat kehilangan nyawa dalam tragedi *Bataan Death March* (Morton, 1993). Sementara itu, Presiden Manuel Luis Quezon melarikan diri ke Amerika Serikat dan mendirikan pemerintahan Commonwealth Filipina di Amerika Serikat dalam pengasingan (Agoncillo, 1990). Douglas MacArthur juga melarikan diri ke Australia dan mulai merencanakan invasi kembali ke Filipina dengan menggunakan strategi lompat katak.

Setelah Jepang berhasil menguasai Filipina pada bulan Juni 1942, Jepang segera mengatur struktur pemerintahan baru yang dikenal sebagai *Puppet State Philippine Republic* melalui pembentukan Komisi Eksekutif Filipina. *Puppet State Philippine Republic* yang dipimpin oleh Presiden José Paciano Laurel, ternyata tidak mendapatkan

dukungan yang signifikan dari masyarakat Filipina. Rakyat Filipina lebih cenderung mempercayai janji kemerdekaan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan, pada masa Filipina menjadi koloni Amerika Serikat (1902-1935), Amerika Serikat memberikan layanan pendidikan dan pembangunan yang lebih merata di wilayah Filipina (Brown, Amadore, & Torrente, 1991). Pada periode ini, banyak warga Filipina terpaksa menjalani kerja paksa di sektor pertanian. Adapun warga Filipina yang bekerja di kota dan industri juga harus beralih menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan bagi pasukan Jepang selama Perang Dunia II (Ara, 2008).

Antara pertengahan tahun 1942 dan pertengahan tahun 1944, pendudukan Jepang di Filipina mengalami perlawanan yang signifikan melalui aktivitas gerilya dan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh pasukan Filipina-Amerika Serikat. Angkatan Darat Filipina bersama dengan sisa-sisa Pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat yang masih ada di Filipina, terus melawan Jepang dalam bentuk perang gerilya. Pasokan makanan untuk pasukan Filipina dan Amerika Serikat selama perang gerilya ini diperoleh melalui Kapal Selam Angkatan Laut Amerika Serikat serta beberapa operasi penerjunan parasut oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Filipina menjadi medan perang yang paling mematikan bagi Jepang, dengan jumlah pasukan Jepang yang tewas mencapai 498.600 jiwa (Bullard, 2007).

Pendudukan Jepang di Filipina berakhir pada tahun 1945. Pada malam hari di Filipina, terjadi pertempuran laut antara pasukan Amerika Serikat dengan Jepang, yang dikenal sebagai Pertempuran Teluk Leyte. Pasukan Amerika Serikat telah terlibat dalam kampanye merebut kembali wilayah Filipina sejak bulan Oktober 1944, ketika Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Teluk Leyte. Pasukan Amerika Serikat dan pasukan Filipina bergerak maju menuju Ibu Kota Manila. Meskipun demikian, pertempuran terus berlangsung hingga Jepang secara resmi meninggalkan Kepulauan Filipina pada tanggal 3 Maret 1945. Sekitar 10.000 pasukan Amerika Serikat dilaporkan hilang selama operasi militer di Filipina saat Perang Dunia II berakhir. Filipina mengalami banyak korban jiwa dan kerusakan yang signifikan, terutama selama Pertempuran Manila. Diperkirakan sekitar 1 juta orang Filipina kehilangan nyawa dan Ibu Kota Filipina, yaitu Manila mengalami kerusakan yang parah. Pertempuran Manila yang berlangsung dari 3 Februari 1945 hingga 3 Maret 1945, merupakan pertempuran terakhir selama pendudukan Jepang di Filipina dan menandai berakhirnya periode pendudukan Jepang di Kepulauan Filipina (Brown, Amadore, & Torrente, 1991).

Setelah Jepang meninggalkan Kepulauan Filipina pada tahun 1945, Filipina memulai proses rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II di kawasan Kepulauan Filipina. Pada tanggal 4 Juli 1946, Amerika Serikat memberikan janji kemerdekaan kepada Filipina secara *de jure* serta mengalokasikan dana sebesar \$2 miliar untuk mendukung pemulihan wilayah Filipina yang terdampak akibat Perang Dunia II (Lembke, 2001). Namun, sebagai syarat untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut, Filipina diwajibkan untuk menyewakan pangkalan lautnya selama 99 tahun kepada Amerika Serikat (Brown et al, 1991).

Analisis Historiografi Penjajahan Amerika Serikat dan Jepang di Kepulauan Filipina Dalam Ruang Lingkup Sejarah Pendekatan Diakronik

Jepang meninggalkan Kepulauan Filipina pada tahun 1945, sementara Amerika Serikat menawarkan janji kemerdekaan, menciptakan dinamika yang menarik dalam historiografi Filipina. Di satu sisi, Jepang terpaksa menarik diri akibat tekanan yang dihadapi selama Perang Dunia II di kawasan Pasifik. Di sisi lain, Amerika Serikat, yang juga terlibat dalam konflik tersebut, memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pengaruhnya di Filipina dengan menawarkan kemerdekaan kepada rakyat Filipina (Eyre, 1942). Penarikan Jepang dari Kepulauan Filipina lebih dipengaruhi oleh faktor militer daripada niat yang tulus untuk memerdekakan wilayah tersebut. Janji kemerdekaan yang pernah disampaikan oleh Jepang sebenarnya merupakan bentuk propaganda untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Filipina dan melemahkan perlawanan mereka terhadap kekuasaan Jepang di Kepulauan Filipina (Sales, 2012).

Janji kemerdekaan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Filipina memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Filipina dan menjadikan mereka sebagai sekutu dalam menghadapi Jepang selama Perang Dunia II di kawasan Pasifik. Hal ini terlihat jelas ketika Filipina berperan sebagai sekutu Amerika Serikat selama periode Perang Dingin (1947-1991), yang merupakan dampak dari pengakuan kemerdekaan Filipina oleh Amerika Serikat (Neelakantan, 2021). Selain itu, tujuan lain dari janji kemerdekaan ini adalah untuk memperkuat pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik dan menggantikan Jepang sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut (Cruz, 2011). Bagi rakyat Filipina, pencapaian kemerdekaan merupakan tujuan utama mereka. Namun, kemerdekaan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Kepulauan Filipina juga menimbulkan konsekuensi berupa ketergantungan

ekonomi dan politik terhadap Amerika Serikat setelah kemerdekaan, terutama selama era Perang Dingin (1947-1991) (Nepomuceno, 2022). Peneliti juga menyajikan perbedaan dalam historiografi mengenai penjajahan Amerika Serikat dan Jepang di Filipina dengan pendekatan diakronik, yang mengamati perkembangan sejarah secara kronologis sebagai berikut.

Tabel 1: Perbandingan Penjajahan Amerika Serikat dan Jepang di Kepulauan Filipina

Aspek Perbandingan	Penjajahan Amerika Serikat di Filipina	Penjajahan Jepang di Filipina
Tujuan Utama	Pembangunan dan modernisasi, sehingga peradaban Kepulauan Filipina mengarah kemajuan	Eksplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusia
Cara Pendekatan	Pendidikan untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan paham liberalisme	Kekerasan, kerja paksa, dan propaganda melalui pamflet
Perlawanan Rakyat	Ada perlawanan, namun sering melemah akibat keyakinan masyarakat Filipina terkait penjajahan Amerika Serikat bersifat memperadabkan	Perlawanan kuat karena Jepang menggunakan pendekatan berupa kekerasan
Historiografi	Fokus pada kontribusi positif, minim sisi negatif dari penjajahan Amerika Serikat	Fokus pada penderitaan dan kekerasan, sehingga menimbulkan perlawanan dari rakyat Filipina sebagai simbol kepahlawanan

Sumber: Data Peneliti

KESIMPULAN

Pada masa kolonialisme Amerika Serikat di Filipina (1899-1941), kebijakan yang diterapkan lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Dominasi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah mengubah struktur ekonomi di Filipina, sehingga masyarakat Filipina menjadi bergantung pada pasar Amerika Serikat. Meskipun demikian, dampak budaya dan penggunaan bahasa Inggris yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat masih dapat dirasakan di kalangan masyarakat Filipina hingga saat ini. Periode kolonialisme ini berakhir menjelang Perang Dunia II, ketika Jepang menguasai kepulauan Filipina. Kolonialisme Jepang di Filipina (1941-1945) menerapkan pemerintahan militer yang sangat represif, berupaya menghilangkan pengaruh Amerika dan memperkenalkan sistem yang lebih sesuai dengan kepentingan Jepang. Pendudukan ini ditandai oleh berbagai tindakan kekerasan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi sumber daya alam Filipina. Masyarakat

Filipina mengalami penderitaan yang mendalam, termasuk kelaparan dan kerja paksa di sektor pertanian. Meskipun Jepang berusaha meraih dukungan dari penduduk lokal dengan menawarkan janji kemerdekaan, banyak warga Filipina yang menolak dan lebih percaya pada janji kemerdekaan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Pendudukan Jepang berakhir pada tahun 1945 setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Pertempuran Manila. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan terus berlangsung, hingga akhirnya Filipina memperoleh kemerdekaan secara *de jure* pada tanggal 4 Juli 1946.

Secara Implikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai historiografi Filipina, khususnya terkait konteks mata kuliah Sejarah Asia Tenggara yang masih minim pembahasannya dalam bahasa Indonesia. Selama pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang berpotensi memengaruhi hasil penelitian, yaitu sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar berasal dari buku dan artikel ilmiah yang ditulis oleh peneliti luar negeri yang berbahasa Inggris dan berbahasa Tagalog dari universitas ternama. Oleh karena itu, disarankan agar hasil penelitian ini dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat menjadi semakin kompleks. Adapun peneliti berharap ada penelitian lebih lanjut terkait sejarah Filipina pada masa Masa Panyupayana (900-1521 M) ditinjau dari pendekatan diakronik dan sejarah Filipina pada masa Republik Filipina Pertama hingga Republik Filipina Kelima ditinjau dari pendekatan diakronik, mengingat belum ada penelitian tentang tersebut dalam bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau.
- Agoncillo, T. A. (1990). *History of The Filipino People: Eighth Edition*. University of The Philippines.
- Ara, S. (2008). Food supply problem in Leyte, Philippines, during the Japanese occupation (1942-44). *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(1), 59-82. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000039>
- Brown, N., Amadore, L. A., & Torrente, E. C. (1991). *Philippines country study*. Library of Congress.
- Bullard, S. (2007). *Japanese Army Operations in The South Pacific Area: New Britain and Papua Campaigns, 1942-44*. Australian War Memorial. <https://doi.org/10.1080/03071845209419628>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating; Quantitative and Qualitative Research*. Pearson.
- Cruz, D. (2011). Pointing to the Heart: Transpacific Filipinas and the Question of Cold-War Philippine-U.S. Relations. *American Quarterly*, 63(1), 1-32.

- Deady, T. K. (2005). Lessons from a Successful Counterinsurgency: The Philippines, 1899-1902. *The US Army War College Quarterly: Parameters*, 35(1), 53-68. <https://doi.org/10.55540/0031-1723.2237>
- Driks, N. B. (1992). *Colonialism and Culture*. University of Michigan Press.
- Ellis, E. S. (1918). *Library of American History: From The Discovery of America to The Present Time*. The Jones Brothers Publishing Company.
- Entantri, M. (2016). Imperialisme Amerika Serikat di Filipina Selatan Pada Tahun 1898-1941. *Thesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Eyre, J. K. (1942). Japan and the American Annexation of the Philippines. *Pacific Historical Review*, 11(1), 55-71.
- Gorman, J. (1992). *Understanding History: An Introduction to Analytical Philosophy of History*. University of Ottawa Press.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kluckhohn, F. L., Baldwin, H. W., Valery, B., & Brock, R. (1941, December). Japanese Bombs Fire Open City of Manila: Civilian Toll Heavy; Invaders Gain in Luzon. *The New York Times*, 1-11.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lacsamana, L. C. (1990). *Philippine History and Government*. Phoenix Pub.
- Lembke, A. E. (2001). *Art of War Papers: Landsdale Magsaysay, America, and The Philippines*. United States Military Academy.
- Linn, B. M. (2000). *The Philippine War 1899-1902*. University of Kansas Press.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Methods for the Social Sciences Global Edition*. Pearson.
- Miftakhuddin. (2019). *Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. Jejak.
- Morton, L. (1993). *The Fall of The Philippines*. Center of Military History United States Army.
- Mulya, R. (2012). *Rudieji Mulya, Feodalisme dan Imperialisme di Era Global*. Elex Media Komputindo.
- Neelakantan, V. (2021). No Nation Can Go Forward When it is Crippled by Disease: Philippine Science and the Cold War, 1946-65. *Southeast Asian Studies*, 10(1), 53-87. https://doi.org/10.20495/seas.10.1_53
- Nepomuceno, T. J. (2022). A Cold War Narrative of Dependency: Revisiting Philippine Collaboration with America and Diosdado Macapagal's Neo-Realist Response. *Scientia*, 11(2), 29-41.
- Nkrumah, K. (2023). *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*. International Publishers.
- Osterhammel, J. (1997). *Colonialism: A Theoretical Overview*. Markus Wiener Publishers.
- Pradadimara, D. (2013). Pembentukan Masyarakat Kolonial di Kepulauan Filipina Hingga Akhir Abad ke-19. *MOZAIK: Jurnal Ilmu Humaniora*, 14(2), 100-219.
- Purnawanto, K. (2007). *Masa Pendudukan Jepang di Filipina (1941-1945)*. Universitas Sebelas Maret.
- Reyes, J. (1923). *Legislative History of America's Economic Policy Toward The Philippines*. University of Michigan Press.
- Roberts, A. (2008). *A History of The English-Speaking Peoples Since 1900*. Harper Perennial.
- Roces, M. (2016). Filipino Elite Women and Public Health in the American Colonial Era,

- 1906–1940. *Women's History Review*, 26(3), 477–502.
<https://doi.org/10.1080/09612025.2016.1194076>
- Russell, C. E., & Rodriguez, E. B. (1923). *The Hero of The Filipinos : The Story of Jose Rizal Poet, Patriot and Martyr*. The Century Co.
- Sales, P. (2012). The Philippines and Japan in America's Shadow. *Asian Studies Review*, 36(4), 12–31.
- Shulimson, J., Renfrow, W. J., Kelly, D. E., & Englander, E. A. (1998). *Marines in The Spanish-American War, 1895-1899*. History and Museum Division Headquarters: U.S. Marine Corps.
- Silbey, D. J. (2007). *A War of Frontier and Empire: The Philippine American War 1899-1902*. Hill and Wang.
- Skrabania, J. (2021). the Philippines Under Spanish and American Colonisation (1565-1912): A Historical Political Religious Development. *Nurt SVD*, 149(1), 43–69.
- Sukesti, R. (2015). Pendekatan Linguistik Sinkronis dan Diakronis Pada Beberapa Dialek Melayu: Pemikiran Kritis Atas Sejarah Bahasa Melayu. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 15(1).
- Ventura, T. (2016). From Small Farms to Progressive Plantations: The Trajectory of Land Reform in The American Colonial Philippines 1900-1916. *Agricultural History*, 90(4), 459–483.
- Zaide, S. M. (1994). *History of Asian Nations*. All Nations Press.